



REPRESENTASI AKSI SOSIAL DALAM KONSTRUKSI IDEOLOGI MEDIA BERITA DIGITAL TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH SELAMA PANDEMI
Representation of Social Action in the Construction of Digital News Media Ideology on Government Policies during the Pandemic

Jafar Lantowa^a dan Rahmatan Idul^b

^{a,b}Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Pos-el: jafar.lantowa@ung.ac.id, rahmatan_idul@ung.ac.id

Naskah Diterima Tanggal 6 Juni 2022 — Direvisi Akhir Tanggal 18 Mei 2023 — Disetujui Tanggal 17 Juni 2023
doi: <https://doi.org/10.26499/rmh.v12i1.5269>

Abstrak

Sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang disebarkan melalui media berita digital. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tak jarang menjadi polemik karena pemberitaan yang berbeda berdasarkan ideologi yang dianut media tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap ideologi media berita digital serta konstruksinya melalui representasi linguistik aksi-aksi sosial dalam pemberitaan kebijakan pemerintah selama pandemi melalui pemanfaatan kosakata dan konjungsi. Data berupa judul berita pada platform digital yang memuat kebijakan pemerintah terkait Covid-19 yang dihasilkan melalui dokumentasi terhadap tiga media digital paling populer di Indonesia menurut Reuters Institute Digital News Report, yakni detik.com, kompas.com, dan cnn.com. Konsep wacana kritis yang diterapkan adalah kerangka aksi sosial Theo van Leeuwen untuk menemukan representasi linguistik setiap aksi sosial melalui pemilihan kata dan konjungsi. Analisis data dilakukan pada dua tahapan: analisis dimensi aksi sosial untuk menemukan representasi linguistik setiap aksi sosial dalam wacana berita melalui pemilihan kata dan konjungsi dan pemetaan ideologi yang menjadi dasar klasifikasi ideologi media berita digital terhadap setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa detiknews.com tidak setuju dengan penerapan PPKM, mendukung vaksinasi, dan netral dalam kisruh data bansos pusat-daerah. Kompas.com juga berdiri di posisi yang sama terkait PPKM dan vaksinasi. Namun, terkait kisruh data bansos pusat-daerah, kompas.com cenderung di sisi pemerintah. Sementara itu, cnnindonesia.com bahkan tidak mempermasalahkan polemik PPKM-PSBB, menitikberatkan ketidaksetujuannya pada vaksinasi berbayar, dan berpihak pada pemerintah pusat dalam kisruh data bansos pusat-daerah.

Kata-kata kunci: representasi aksi sosial, konstruksi ideologi, media berita digital, pandemi, Covid-19

Abstract

In response to the Covid-19 pandemic, the government issued several policies disseminated through digital news media. However, these policies often become polemic in the community due to the different reporting based on the ideology of the media. The study aims to reveal the ideological construction of digital news media through linguistic representations of social actions in reporting on government policies during the pandemic through the employment of vocabulary and conjunctions. The data consists of digital news headlines on government policies during the pandemic generated through documentation from the three most popular digital media in Indonesia according to the Reuters Institute Digital News Report, namely Detik.com, Kompas.com, and CNN.com. The Critical Discourse concept applied is Theo van Leeuwen's social action framework to find the linguistic representation of each social action through the choice of words and conjunctions. Data analysis was carried out in two stages: analysis of the dimensions of social action to find linguistic representations of each social action in news discourse through word selection and conjunctions and ideological mapping which forms the basis of ideological classification of digital news media for every government policy related to handling Covid-19. As a result, it appears that detiknews.com does not agree with the implementation of PPKM, supports the vaccination program, and is neutral in social assistance data disputes between the central and regional governments. Kompas.com also stands in the same position on the issue of PPKM and vaccination. However, regarding the social assistance data dispute between the central and local governments, kompas.com tended to be on the

government side. Meanwhile, cnnindonesia.com did not even question the PPKM-PSBB polemic, but emphasized its disapproval of paid vaccinations and sided with the central government in the social assistance data dispute between the central and regional governments.

Keywords: *representation of social action, ideological construction, digital news media, pandemic, Covid-19*

How to Cite: Jafar Lantowa dan Rahmatan Idul. (2023). Representasi Aksi Sosial dalam Konstruksi Ideologi Media Berita Digital Terkait Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. 12(1). 87—100. doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v12i1.5269>

PENDAHULUAN

Sebagaimana dirilis pada laman resmi WHO, hingga 28 Maret 2022, penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan kematian 6.108.976 jiwa dari total 476.374.234 kasus terkonfirmasi (World Health Organization, 2022). Dampak pandemik ini melanda berbagai sektor kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. Merespon fenomena ini, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk meminimalisasi dampak destruktif pandemik terhadap kehidupan masyarakat, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), vaksinasi, pemberian bantuan sosial, atau penetapan protokol kesehatan di ruang publik. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan kesadaran publik tentang strategi pencegahan dan intervensi penyebaran Covid-19 dengan memberikan informasi terkini harian di situs web dan media sosial. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tak jarang menjadi polemik di tengah masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh wacana pemberitaan yang disajikan secara berbeda di setiap media massa berdasarkan ideologi yang dianut media tersebut.

Saat ini, media massa baik cetak atau digital berperan penting terutama pada perkembangan politik dalam sebuah negara (Jamil, Daniel, & Qassem, 2021; Landert, 2014; Putra, Cangara, & Darwis, 2015; Schäfer, 2011; Yuliantri & Darmatadara, 2015). Namun, media massa dalam menyebarluaskan berita sangat sarat dengan berbagai kepentingan. Untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut, pengusaha media massa mengonstruksi isi berita yang dimuatnya sedemikian rupa. Sehingga, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kelemahan pada media berita digital saat ini. Pada akhirnya, pemerintah maupun pengusaha media harus memainkan perannya untuk mencegah media berita digital dijadikan senjata untuk menabur ketidakpercayaan di tengah masyarakat atau bahkan membahayakan kesehatan masyarakat (Limaye et al., 2020). Dalam hal ini, respons, advokasi, dan mobilisasi media berita digital berperan penting dalam penyebaran informasi, baik melalui data visual maupun verbal (Bao, Cao, Xiong, & Tang, 2020; Bouvier & Machin, 2018; Huda, 2022).

Penelitian terkait ideologi dan media massa telah banyak dilakukan. Arifin & Basuki (2018) misalnya, menganalisis pemberitaan media lokal Yogyakarta terhadap pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA). Melalui analisis wacana kritis, mereka menemukan bahwa *krjogja.com* memproduksi wacana dukungan terhadap pembangunan NYIA dengan memosisikan narasumber yang pro kebijakan tersebut sebagai subjek pemberitaan.

Penelitian lain dilakukan oleh Halwati (2014) yang memanfaatkan analisis wacana kritis untuk menganalisis *Harian Kompas* tahun 2013-2014. Hasilnya, dari segi tematik, pemberitaan pada *Kompas* lebih banyak mengambil tema terkait tokoh kandidat capres dan arah koalisi pemilihan presiden 2014. Dalam aspek skematik, *Kompas* mempunyai skema yang sistematis. Dari sisi semantik, makna yang ingin ditekankan *Kompas* adalah masing-masing partai mempunyai kandidat capres, tetapi pileg dan elektabilitas tokoh yang akan menjadi penentu. Dari aspek stilistik, *Kompas* menggunakan kata-kata yang universal, humanistik, dan tidak kering, menggunakan elemen grafis untuk menonjolkan atau menekankan yang dianggap penting dengan menggunakan foto atau gambar dan juga grafik, serta menaruh berita politik dalam tajuk berita.

Selain dua penelitian tersebut, terdapat dua penelitian lain yang khusus menganalisis ideologi dalam media massa. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurhusna (2017) yang menganalisis penanda kualitas mewujud ajektiva sebagai ideologi dalam wacana iklan advertorial media massa cetak. Hasilnya menunjukkan bahwa tanda kualitas yang terkandung dalam wacana ajektiva advertorial periklanan adalah penanda ciri-ciri fisik kata sifat seperti keadaan, warna, ukuran, bentuk, jarak, waktu, dan jalan, dan penanda non-fisik seperti indera dan perasaan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fathurokhmah (2018) yang menganalisis ideologi radikalisme dalam Islam terkait wacana homoseksual di media massa. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ideologi yang mendasar antara Republika dan Koran Tempo dalam melakukan pembaruan konsep homoseksual dengan radikalisme berpikir dengan pijakan ajaran Islam. Terkait homoseksualitas, FPI menerapkan makna radikalisme Islam yang mengedepankan kekerasan sebagai perlawanan, sedangkan JIL menerapkan makna radikalisme yang mengutamakan keradikalan pemikiran dan hukum dalam al-qur'an.

Pendekatan lain yang berusaha mengungkap representasi ideologi dalam media berita dilakukan oleh Nurdin (2020). Studi ini menyelidiki representasi ideologi dalam teks berita kriminal di media Tribun Timur. Secara eksklusif, Tribun Timur merepresentasikan ideologinya melalui strategi, identifikasi, asimilasi, dan asosiasi, sedangkan secara inklusif, representasi ideologi dilakukan melalui strategi nominasi.

Dari sejumlah penelitian tersebut, sebagian besar lebih memfokuskan penelitiannya pada media massa cetak. Adapun penelitian yang menjadikan media digital sebagai titik fokusnya hanya menganalisis refleksi ideologi media terhadap topik tertentu. Dalam hal ini, belum ada penelitian yang membandingkan bagaimana media-media digital populer saat ini merepresentasikan dan mengintegrasikan ideologinya dalam pemberitaan, terutama terkait kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menganalisis representasi aksi sosial dalam konstruksi ideologi media berita digital terkait kebijakan pemerintah selama pandemi. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini dapat mengungkap lapisan-lapisan makna, bias, penekanan, atau pengaruh ideologi yang tersembunyi dalam pemberitaan media berita digital. Pendekatan ini memberi pemahaman yang lebih dalam tentang cara media berita digital memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pertama, penelitian ini dapat memberi masukan penting bagi pemerintah dan pengusaha media dalam menghadapi tantangan terkait penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kedua, penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola media berita digital untuk memastikan penyebaran informasi yang objektif, seimbang, dan dapat dipercaya selama situasi krisis seperti pandemi.

LANDASAN TEORI

Dalam konteks kekinian, belum ada satupun definisi berita yang dapat diterima secara umum dan mutlak (XIE, 2018). Menurut Hallin & Mancini (1985), berita merupakan suatu pantulan dan cerminan dari realita. Akan tetapi, sudut pandang ini mendapatkan penolakan oleh para konstruksionis. Fowler (1991) menyebut berita sebagai produk sebuah industri yang dibentuk oleh hubungan antara media dan industri lainnya, antara struktur birokrasi dan ekonomi industri tersebut, dan antara pemerintah dengan lembaga politik lainnya. Dalam hal ini, hasil kerja dari jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang tepat karena berita adalah bahan dari sebuah konstruksi dan pemaknaan seseorang atas suatu ideologi yang bisa jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda (Cissel, 2012; Syamsul & Romli, 2012).

Raymond Williams dalam Sobur (2011:64) mendefinisikan ideologi sebagai kepentingan karakter dari ide dalam sebuah kelas. Dalam pandangan marxis fundamentalis, ideologi merupakan sebuah kesadaran palsu sebagai konsekuensi atas praktik kapitalisme pada dominasi ekonomi. Sementara itu, non-marxis memandang ideologi sebagai representasi kelompok atau individu tidak ke dalam kesadaran palsu yang negatif dan perspektif negatif (Rusadi, 2015). Dalam konteks ini, media berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan opini masyarakat mengenai kinerja pemerintah, dan menjadi sandaran informasi politik yang mampu memengaruhi persepsi mereka (Budhirianto, Noneng & Syaidah, 2018).

Sebagai wacana, berita dapat dipandang sebagai penggunaan bahasa untuk merepresentasikan praktik-praktik sosial (Fairclough, 1995). Dialektika antara struktur sosial dan diskursus atau praktik sosial ini menjadi poin penting dalam konstruksi analisis wacana kritisnya. Dengan menganggap wacana sebagai praktik sosial, Fairclough secara otomatis menolak penyamaan diskursus dengan teks. Baginya, teks merupakan sebuah produk dari proses produksi teks, sedangkan diskursus mencakup seluruh proses interaksi sosial, di mana teks hanya menjadi salah satu bagiannya. Dengan demikian, analisis wacana yang ditawarkan tidak hanya terfokus pada teks saja, tapi juga mencakup konsumsi teks oleh pembaca dan sekaligus relasinya dengan kondisi sosiokulturalnya (Fairclough, 2001).

Salah satu elemen penting dalam suatu praktik sosial, sebagaimana diungkapkan oleh van Leeuwen (2008), adalah aksi sosial. Aksi sosial dapat direpresentasikan melalui pemilihan kata dan konjungsi. Dalam suatu wacana, kosakata biasanya digunakan untuk membuat suatu klasifikasi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dan untuk menghadirkan konotasi-konotasi tertentu yang diinginkan seorang pewacana. Sementara itu, konjungsi digunakan dalam wacana untuk menghubungkan dua entitas yang berbeda agar tampak berkoherensi.

Konjungsi didefinisikan oleh Lubis (2011) sebagai alat untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lain. Konjungsi juga dapat difungsikan untuk merangkaikan beberapa unsur bahasa dalam kalimat (Nasucha, Rohmadi, & Wahyudi, 2009). Secara spesifik, Muslich (2010) memandang konjungsi sebagai kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih, sedangkan Finoza (2013) melihatnya sebagai kata tugas yang merangkaikan dua kata atau kalimat. Secara umum, konjungsi terdiri atas dua jenis: koordinatif dan subordinatif. Chaer (2009) mengemukakan bahwa “Konjungsi koordinatif menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya sederajat. Sementara itu, Konjungsi subordinatif menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak sederajat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode analisis wacana kritis untuk mengungkap ideologi setiap media digital dan implementasinya dalam pemberitaan kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Konsep wacana kritis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kerangka analisis aksi sosial (van Leeuwen, 2008). Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji representasi linguistik aksi-aksi sosial yang termuat dalam wacana berita terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi. Hasilnya kemudian bermuara pada pemetaan ideologi setiap media berita digital populer yang menjadi objek formal penelitian ini dan konstruksinya dalam wacana berita yang disajikannya.

Data penelitian berupa judul berita pada platform digital yang memuat kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Data tersebut bersumber dari tiga media digital paling populer di Indonesia menurut hasil riset Reuters Institute Digital News Report

(Newman et al., 2021:136). Media-media tersebut adalah detik.com, kompas.com, dan cnn.com.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi untuk menemukan data terkait objek penelitian. Data yang dihasilkan berbentuk digital, dalam hal ini judul berita digital yang memuat kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Sebelum melangkah ke tahap analisis, data tersebut dikelompokkan berdasarkan bentuk representasi linguistik aksi sosialnya, yakni berdasarkan kosakata dan konjungsi.

Analisis data dilakukan pada dua tahapan: analisis dimensi aksi sosial dan pemetaan ideologi. Pada tahap analisis dimensi aksi sosial, data diolah untuk menemukan representasi linguistik setiap aksi sosial dalam wacana berita terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi melalui pemilihan kata dan konjungsi. Pada tahap berikutnya, hasil analisis tahap pertama dijadikan sebagai dasar klasifikasi ideologi media berita digital terhadap setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

PEMBAHASAN

Konstruksi ideologi dalam sebuah media berita dapat dilakukan melalui penggambaran peristiwa-peristiwa sosial di dalamnya. Dalam hal ini, ada beberapa piranti linguistik yang dapat digunakan, dua di antaranya adalah penggunaan kosa kata dan konjungsi.

Pemanfaatan Kosa Kata

Melalui pemanfaatan kosakata, detiknews.com mencoba menciptakan klasifikasi pada tiga isu utama. Peristiwa-peristiwa sosial tersebut adalah penerapan PPKM, polemik vaksinasi, dan persoalan bantuan sosial sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Pemilihan Kata untuk Klasifikasi detiknews.com

Data	Ekspresi Linguistik
PD.1	Pemerintah Gencar Guyur Bansos, DPR Soroti 'Isinya'
PD.2	Moeldoko: Vaksinasi COVID-19 untuk Presiden Sama dengan yang Lain
PD.3	PPKM Mikro Masih Diandalkan Pemerintah di Tengah Desakan PSBB
PD.4	Lengkap! Pernyataan Jokowi Pilih PPKM Mikro Kala Ada Usul Lockdown
PD.5	Epidemiolog Sarankan PSBB Ketimbang Penebalan PPKM Mikro, Ini Alasannya
PD.6	Pakar: PPKM Mikro TerbuktiGagal , Indonesia Harus PSBB
PD.7	Dampak PPKM ke Pengusaha Mal TakSeparah PSBB

Sumber: detiknews.com

Data PD.1 pada tabel membahas isu terkait penyaluran bantuan sosial di masa pandemi pada dua aspek, penyalurannya dan isinya. Ketika menyinggung soal penyalurannya, detiknews.com menggunakan verba “guyur”. Dalam KBBI, kata guyur bermakna ‘menyiram menggunakan sungkup’. Secara semantik, yang membedakan kata ini dengan “siram” adalah kuantitas air yang digunakan. Kata “guyur” menyiratkan penggunaan air yang lebih banyak dari kata “siram”. Dengan demikian, kata “guyur” pada data PD.1 berkonotasi positif, bahwa penyaluran bantuan sosial pada masyarakat besar secara kuantitas.

Sementara itu, ketika membahas isi bantuan, detiknews.com menggunakan verba “soroti” yang salah satu maknanya adalah ‘mengawasi; mengamati (tingkah laku dan sebagainya)’. Dalam penggunaannya, kata ini seringkali berkonotasi negatif, misalnya pada kalimat “Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti proyek pembangunan 488 toilet...anggarannya mencapai 198,5 juta per unit” (terobosan.co.id). Dengan demikian, verba “soroti” menyiratkan adanya potensi kesalahan atau penyimpangan dalam bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah.

Peristiwa sosial kedua yang dibahas dalam detiknews.com adalah polemik terkait vaksinasi. Banyaknya hoaks dan informasi simpang-siur menghadirkan ketakutan dalam masyarakat. Merespons gejala ketakutan ini, Presiden Jokowi berinisiatif menjadi orang pertama yang divaksin di Indonesia. Namun, sebagian besar masyarakat menyangsikan keaslian vaksin yang akan diinjeksikan. Untuk itu, data PD.2 menyiratkan penegasan pemerintah bahwa tidak ada perbedaan kelas atau klasifikasi dalam vaksinasi dan bahwa vaksin yang digunakan oleh Presiden Jokowi aman dan sama dengan vaksin yang akan disalurkan ke masyarakat.

Klasifikasi peristiwa sosial berikutnya adalah polemik antara penerapan PPKM dan PSBB. Dalam hal ini, pemerintah memilih penerapan PPKM. Hal ini tampak pada pemilihan kata “diandalkan” untuk menghubungkan “pemerintah” dan “PPKM” pada data PD.3. Hal ini didukung oleh kata “pilih” yang menghubungkan “Presiden Jokowi” dengan “PPKM” pada data PD.4. Kedua kata ini dikontraskan dengan “desakan” dan “usul” yang masing-masing menghubungkan “PSBB” (PD.3) dan “Lockdown” (PD.4) dengan aktor non-existen. Ketidakhadiran aktor ini menyiratkan keumuman bahwa PSBB dan *Lockdown* adalah desakan dan usulan dari masyarakat umum. Dengan demikian, keputusan pemerintah yang memilih PPKM dianggap tidak populis.

Anggapan ini diperkuat dengan data PD.5, PD.6, dan PD.7. Data PD.5 dan PD.6 memilih verba “sarankan” dan klausa “terbukti gagal” untuk membuktikan kelemahan kebijakan PPKM yang ditempuh pemerintah dan urgensi penerapan PSBB sebagai gantinya. Kehadiran aktor “epidemiolog” dan “pakar” adalah untuk menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya bertentangan dengan keinginan rakyat, tetapi juga berseberangan dengan hasil asesmen pakar dan pihak-pihak yang berkompeten. Lebih lanjut, data PD.7 menngungkap aspek lain yang terdampak oleh kebijakan PPKM. Verba “separah” dengan negasi “tak” pada frasa verbal “tak separah” berusaha mengekspos dampak negatif penerapan PPKM di sektor ekonomi yang lebih parah dari PSBB.

Selain untuk menciptakan klasifikasi, detiknews.com juga memanfaatkan kosakata dalam bentuk nomina dan frasa nomina untuk menghasilkan konotasi tertentu. Berikut tabel penyajian datanya.

Tabel 2.
Pemilihan Kata dan Frasadetiknews.com

Data	Ekspresi Linguistik
FD.1	Vaksin COVID Sinovac Halal, Legislator PPP: Tutup Perdebatan Soal Kehalalan
FD.2	7 Poin Tausiah MUI Dukung Pemerintah soal Vaksinasi COVID-19
FD.3	Efikasi Vaksin Sinovac 65,3%,, Satgas: Lampau Standar WHO
FD.4	Janji Mensos Benahi Bansos yang Tumpang Tindih
FD.5	Muncul Polemik Data Bansos Corona, Moeldoko: Banyak Warga Miskin Baru

Sumber: detiknews.com

FD.1 dan FD.2 berkaitan dengan vaksinasi yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya terkait status kehalalannya. Oleh karena itu, pernyataan dari legislator dari salah satu partai Islam dan tausiah dari MUI yang mendukung program tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menutup perdebatan di tengah masyarakat. Persoalan lain terkait vaksinasi adalah terkait efikasinya yang dianggap lebih rendah dari vaksin lain. Hal ini dijawab oleh data FD.3. Frasa “standar WHO” yang didahului oleh verba “lampau” menegaskan bahwa vaksin yang dipilih pemerintah telah memenuhi bahkan lebih tinggi dari standar efikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi kesehatan dunia WHO sehingga aman digunakan.

Pemberitaan penyaluran bansos yang diliputi masalah tak luput dari penggunaan nomina atau frasa nomina berkonotasi tertentu. Pada FD.4, frasa “tumpang tindih” menyiratkan bahwa data terkait penerima dan penyaluran bansos dinilai masih belum taat administrasi. Salah satu indikasinya adalah munculnya “warga miskin baru” pada FD.5.

Sementara itu, kompas.com memanfaatkan kosa kata untuk membahas dua peristiwa penting: polemik PPKM-PSBB dan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Berikut penyajian datanya:

Tabel 3.
Pemilihan Kata kompas.com

Data	Ekspresi Linguistik
PK.1	PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif , Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB
PK.2	Dorong Penerapan PSBB, PB IDI Nilai Kebijakan Berdasar Zonasi Tak LagiRelevan
PK.3	Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi Covid-19
PK.4	Rencana Vaksinasi November, Epidemiolog: Belum Ada Vaksin Corona yang Penuhi Aspek Keamanan
PK.5	Pemerintah Didorong Realokasi Anggaran 2021 untuk Vaksinasi Covid-19 Gratis
PK.6	Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Kepala Daerah, Ini Usulan Ombudsman
PK.7	Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

Sumber: kompas.com

Peristiwa sosial pertama adalah polemik penerapan PPKM atau PPKB. Data PK.1 dan PK.2 menunjukkan dengan jelas ketidaksetujuan kompas.com terhadap pilhan pemerintah untuk menerapkan PPKM. Dengan memanfaatkan frasa ajektiva bernegasi “tidak”, kompas.com hendak menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberlakukan PSBB karena PPKM “tidak efektif” dan sudah “tidak relevan lagi”.

Penggunaan negasi kembali digunakan oleh kompas.com saat mengulas kebijakan vaksinasi. Hal ini tampak pada frasa ajektiva bernegasi “tak tergesa-gesa” pada data PK.3 dan “belum ada” pada data PK.4. Dalam hal ini, kompas.com mendukung penundaan vaksinasi karena belum ada vaksin yang memenuhi standar keamanan untuk digunakan oleh masyarakat. Aspek lain vaksinasi yang disorot oleh kompas adalah wacana vaksinasi berbayar. Di sini, kompas.com menunjukkan ketidaksetujuannya dengan memanfaatkan frasa nomina “realokasi anggaran 2021” pada data PK.5 sebagai solusi agar vaksinasi tetap dapat digratiskan bagi masyarakat luas.

Isu lain yang diangkat oleh kompas.com adalah kisruh terkait penyaluran bansos. Pada data PK.6 dan PK.7, kompas.com menggunakan dua frasa verbal yang sama, yakni “rawan dipolitisasi”. Di sini, kompas.com mencoba untuk tidak secara frontal mengatakan bahwa salah satu penyebab kisruhnya penyaluran bansos adalah politisasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. Penggunaan kata “rawan” adalah untuk mengubah kesan menuduh pihak tertentu melakukan politisasi menjadi kekhawatiran akan potensi terjadinya politisasi tersebut.

Sedikit berbeda dengan media berita digital yang dijelaskan sebelumnya, cnnindonesia.com hanya menyoroti dua isu, yakni program vaksinasi pemerintah dan kisruh bansos. Salah satu aspek dari vaksinasi yang dibahas oleh cnnindonesia.com adalah wacana vaksin berbayar. Berikut penyajian datanya.

Tabel 4.
Pemilihan Kata untukKlasifikasicnnindonesia.com

Data	Ekspresi Linguistik
PC.1	Vaksin Berbayar & Ikrar Jokowi Utamakan Kesehatan Rakyat
PC.2	Pakar: Vaksin Berbayar Bertentangan Status Bencana Nasional

Sumber: cnnindonesia.com

Pada tabel 4, cnnindonesia.com memanfaatkan kosakata untuk membuat klasifikasi terkait wacana vaksin berbayar. Pada PC.1, cnnindonesia.com membuat dikotomi antara vaksin berbayar dan ikrar Presiden Jokowi untuk mengutamakan kesehatan rakyat. Dikotomi ini menciptakan kesan bahwa vaksin berbayar berada pada kutub yang berseberangan dengan janji Jokowi untuk memprioritaskan kesehatan rakyat. Pada data selanjutnya, PC.2, cnnindonesia.com kembali membuat klasifikasi, yakni antara vaksin berbayar dengan status bencana nasional. Dalam hal ini, cnnindonesia.com menganggap bahwa vaksin berbayar tidak sesuai dengan status bencana nasional. Sebab, implikasi logis dari penetapan status bencana, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, adalah pemerintah berperan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan kosakata untuk membuat klasifikasi oleh cnnindonesia.com bertujuan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap wacana vaksin berbayar.

Selain untuk menciptakan klasifikasi, cnnindonesia.com juga memanfaatkan kosakata dalam bentuk kata dan frasa untuk menghasilkan konotasi tertentu. Berikut tabel penyajian datanya.

Tabel 5.
Pemilihan Kata dan Frasa cnnindonesia.com

Data	Ekspresi Linguistik
FC.1	IDI Ingatkan Terawan Instruksi Jokowi Tak Tergesa soal Vaksin
FC.2	Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data
FC.3	Pengamat Terima Bansos, Pemerintah Disebut Gunakan Data Lama
FC.4	Bappenas Bocorkan Kegemaran Daerah Manipulasi Data Kemiskinan
FC.5	Jokowi Janji Perbaiki Masalah Data dalam Pembagian Bansos

Sumber: cnnindonesia.com

Data FC.1 memuat dukungan cnnindonesia.com pada wacana penundaan vaksinasi. Di sini, cnnindonesia.com memanfaatkan frasa adjektiva bernegasi “tak tergesa” untuk menyiratkan bahwa pelaksanaan vaksinasi dalam waktu dekat merupakan keputusan yang tergesa-gesa.

Empat data berikutnya menyoal kekacauan penyaluran bansos. Pada FC.2, cnnindonesia.com memanfaatkan frasa “masalah klasik big data” untuk menunjukkan bahwa persoalan data penerima bansos bukan hal baru, melainkan masalah lama yang terus terjadi dan tak kunjung dibenahi. Hal ini diperjelas oleh frasa “data lama” pada FC.3 yang membuktikan bahwa kekacauan data penerima bansos telah lama berlangsung namun belum dibenahi. Pada FC.4, cnnindonesia.com memanfaatkan klausa “manipulasi data kemiskinan” untuk mengindikasikan bahwa salah satu sebab tumpang-tindihnya data penerima bansos adalah ulah pemerintah daerah yang gemar mengubah data demi kepentingan pribadi. Sampai di titik ini, cnnindonesia.com tampak berusaha netral dalam kisruh bansos pusat-daerah. Namun, klausa “jokowi janji” pada data FC.5 menunjukkan bahwa posisi cnnindonesia.com adalah di sisi presiden. Setelah menjelaskan peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat (kementerian terkait) dalam kekacauan data penerima bansos, cnnindonesia.com kemudian menempatkan Presiden Jokowi sebagai penengah yang akan memperbaiki masalah tersebut.

Penggunaan Konjungsi

Konjungsi atau kata hubung menyiratkan suatu koherensi yang bertujuan menghubungkan dua fakta berbeda. Tipe hubungan atau koherensi dua atau lebih fakta dalam suatu klausa atau kalimat ditentukan oleh tipe konjungsinya. Pembahasan konjungsi dalam artikel ini tidak berfokus pada tingkat koherensi suatu data, melainkan pada aksi-aksi sosial yang ingin ditampilkan oleh seorang pewacana dan bagaimana aksi-aksi sosial tersebut ditampilkan.

Terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotan detiknews.com melalui penggunaan konjungsi, yakni PPKM-PSBB, vaksinasi, dan bansos. Kedua tipe konjungsi, koordinatif dan subordinatif, digunakan dalam menampilkan isu-isu tersebut. Detailnya ditampilkan melalui tabel berikut.

Tabel 6.
Konjungsidetiknews.com

Data	Ekspresi Linguistik
KD.1	Jokowi Pilih PPKM Mikro Demi Jaga Ekonomi, Tepat atau Blunder?
KD.2	Jeritan Pengusaha Warteg: Kalau Gali Lobang Lagi, Jatuh ke Jurang!
KD.3	Menag: Vaksin COVID-19 Halal dan Suci, Tak Mengandung Babi
KD.4	Vaksin Sinovac Halal, MUI Susun Fatwa Lengkap Setelah Hasil Final BPOM
KD.5	Bansos Tumpang Tindih, Mensos: Selanjutnya Pakai Data Baru dan Usulan RT
KD.6	Bansos Disalurkan 2 Kali Sebelum Lebaran, Mensos: Tentu Tak Bisa Merata

Sumber: detiknews.com

Isu pertama ditampilkan melalui data KD.1 dan KD.2. KD.1 memanfaatkan konjungsi koordinatif “atau” untuk menghubungkan dua entitas yang berbeda, yakni ajektiva “tepat” dan nomina “blunder”. Secara struktural, penggunaan konjungsi ini kurang tepat, karena konjungsi koordinatif pada dasarnya menghubungkan dua entitas dengan kelas kata yang sama. Namun, yang menjadi fokus utama pembahasan ini adalah aksi sosial yang direpresentasikannya.

Pada KD.1, detiknews.com menghubungkan keputusan Presiden Jokowi yang memilih PPKM mikro dengan ketahanan ekonomi rakyat. Hubungan yang dibangun oleh data tersebut adalah koherensi pilihan. Dengan demikian, KD.1 menyiratkan bahwa keputusan Presiden Jokowi memilih PPKM di tengah desakan PSBB dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional di satu sisi, namun berpotensi menjadi blunder yang justru dapat memperparah dampak destruktif pandemi terhadap perekonomian masyarakat di sisi yang lain. Hal ini didukung oleh penggunaan konjungsi subordinatif “kalau” pada data KD.2. Walaupun KD.2 tidak eksplisit, klausa “gali lobang lagi” masih dapat dimaknai secara kontekstual sebagai ‘penerapan kembali PPKM’. Konjungsi “kalau” yang membawa koherensi persyaratan menyiratkan bahwa pihak yang paling terdampak secara ekonomis oleh pandemi adalah para pengusaha warteg. Sehingga, jika pemerintah mengabaikan desakan PSBB dan memilih menerapkan kembali PPKM, mereka akan semakin terpuruk.

Isu berikutnya yang menjadi sorotan detiknews.com adalah vaksinasi dan polemik yang melingkupinya yang direpresentasikan oleh data KD.3 dan KD.4. Konjungsi koordinatif “dan” pada KD.3 berusaha menghubungkan dua adjektiva dengan koherensi aditif atau penggabungan, yakni “halal” dan “suci”. Untuk itu, KD.3 menunjukkan bahwa tidak boleh ada keraguan terhadap penggunaan vaksin Sinovac. Artinya, isu yang berkembang bahwa vaksin Sinovac mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara agama adalah kabar yang tidak berdasar. Tindak lanjut dari pernyataan ini dinyatakan pada data KD.4. Konjungsi subordinatif dengan koherensi temporal “setelah” menghubungkan tiga peristiwa secara kronologis. Dengan demikian, KD.4 menyebutkan dengan jelas langkah-langkah strategis pemerintah sebelum memulai vaksinasi, yakni memastikan kehalalan vaksin, memeriksa keamanan kandungan vaksin bagi kesehatan, lalu menyusun fatwa secara lengkap.

Masalah bansos merupakan isu terakhir yang disorot oleh detiknews.com. Melalui konjungsi koordinatif “selanjutnya”, data KD.5 menghubungkan dan membandingkan dua peristiwa secara kronologis. Permasalahan utama penyaluran bansos adalah data penerima yang dianggap tumpang-tindih. Konjungsi “selanjutnya” menyiratkan bahwa data lama penerima bansos tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karenanya, penyaluran bansos berikutnya harus menggunakan data baru melalui persetujuan ketua RT setempat yang

dianggap paling mengetahui kondisi warganya. Selain data penerima yang tidak akurat, penyaluran bansos juga dikritik karena penyalurannya tidak serentak. Konjungsi “sebelum” pada data KD.6 menunjukkan pertalian temporal antara penyaluran bansos dan momen lebaran. Artinya, pemerintah setidaknya telah menuntaskan dua dari tiga tahap penyaluran bansos yang direncanakan. Waktu yang singkat telah dimanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah untuk menyalurkan bansos lebih dari 65%, yang diharapkan dapat meringankan dampak finansial yang ditimbulkan oleh pandemi di tengah masyarakat. Sehingga, pemerintah berharap masyarakat dapat bersabar dan memaklumi jika sepertiga wilayah lainnya belum terakomodasi sebelum lebaran.

Berbeda dengan detiknews.com, penggunaan konjungsi dalam kompas.com hanya meliputi dua isu saja, yakni PPPKM-PSBB dan vaksinasi. Harian digital kompas.com menggunakan konjungsi subordinatif dalam pemberitaan terkait PPPKM-PSBB dan konjungsi koordinatif terkait vaksinasi. Detailnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.

Konjungsikompas.com

Data	Ekspresi Linguistik
KK.1	IDI: Kurangi Penambahan Pasien Covid-19 dengan PSBB Diperketat
KK.2	543.975 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Vaksinasi yang Diklaim Dimulai Sebentar Lagi
KK.3	Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi BPOM dan Fatwa MUI
KK.4	Italia Tawarkan Vaksinasi Covid-19 Gratis Dimulai dari Dokter dan Penghuni Panti Jompo
KK.5	Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Sumber: kompas.com

Data KK.1 memanfaatkan konjungsi subordinatif “dengan” yang membawa makna ‘cara’. Konjungsi ini menghubungkan konstituen “mengurangi penambahan pasien Covid-19” dan “PSBB diperketat”. Dalam hal ini, kompas.com lebih memilih penerapan PSBB yang ketat ketimbang pemberlakuan kembali PPPKM sebagaimana yang diwacanakan pemerintah. PSBB diyakini lebih efektif mengurangi kasus penularan Covid-19 daripada PPPKM.

Selanjutnya, kompas.com memanfaatkan konjungsi koordinatif “dan” dengan koherensi aditif untuk membahas vaksinasi dari beberapa aspek berbeda. Pertama, konjungsi “dan” pada data KK.2 menghubungkan antara tingginya kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan vaksinasi yang belum juga dilaksanakan. Walaupun secara leksikal konjungsi “dan” membah makna ‘penggabungan’, secara kontekstual kita dapat memahami bahwa hubungan antara kedua entitas tersebut adalah kausal. Dalam hal ini, vaksinasi yang belum juga dilaksanakan dianggap sebagai sebab terus meningkatnya angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Data KK.3 berusaha menjelaskan penyebab belum dimulainya program vaksinasi. Konjungsi koordinatif “dan” menghubungkan frasa nomina “evaluasi BPOM” dan “fatwa MUI”. Selain untuk menjustifikasi keputusan pemerintah menunda vaksinasi, pemanfaatan konjungsi “dan” dalam konteks ini juga bertujuan menepis kabar bohong tentang kandungan vaksin yang tidak halal dan aman bagi kesehatan. Frasa “evaluasi BPOM” menjadi jaminan keamanan kandungan vaksin dan frasa “fatwa MUI” menjadi jaminan kehalalan vaksin.

Aspek lain vaksinasi yang menjadi sorotan kompas.com melalui penggunaan konjungsi adalah wacana vaksin berbayar. Data KK.4 menjadikan vaksinasi gratis di Italia untuk menunjukkan ketidaksetujuan kompas.com dengan wacana vaksin berbayar. Di Indonesia, vaksinasi pertama diprioritaskan bagi para pekerja kesehatan. Dengan demikian, konjungsi koordinatif “dan” pada KK.4 menghubungkan entitas dokter dan penghuni panti jompo dan menyiratkan bahwa lansia dapat dipertimbangkan untuk menjadi penerima vaksin berikutnya.

Data KK.5 memanfaatkan konjungsi koordinatif “dan” untuk menghubungkan antara MUI dan tokoh-tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya penentangan terhadap vaksinani berasal dari kalangan religius. Untuk itu, MUI dan tokoh-tokoh agama dianggap mampu untuk memberi pemahaman kepada mereka akan pentingnya vaksinasi.

Sementara itu, penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif dalam *cnnindonesia.com* hanya meliputi isu vaksinasi dan bansos saja. Detailnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 8.
Konjungsi *cnnindonesia.com*

Data	Ekspresi Linguistik
KC.1	BPOM: Izin Darurat Vaksin Tunggu Data Mutu dan Klinis Lengkap
KC.2	Badan POM Kawal Keamanan, Khasiat, dan Mutu Vaksin Covid-19
KC.3	Satgas Covid-19: Prinsip Utama Vaksin Aman dan Efektif
KC.4	KSP: Penundaan Vaksin karena Prinsip Kehati-hatian Presiden
KC.5	Pemerintah Akan Pastikan Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid
KC.6	Satgas Covid-19: Vaksin Gratis untuk Mencapai Herd Immunity
KC.7	Jokowi Minta Bansos Fleksibel Jika Warga Miskin Belum Dapat

Sumber: *cnnindonesia.com*

Aspek vaksinasi pertama yang diakomodasi dalam data adalah penundaan pemberian vaksin. Data KC.1, KC.2, dan KC.3 sama-sama menggunakan konjungsi koordinatif “dan” untuk menghubungkan konstituen yang pada dasarnya sama. Ketiga data menyiratkan bahwa penundaan vaksinasi adalah untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas vaksin sebelum disalurkan ke masyarakat. Hal ini didukung oleh data KC.4. Konjungsi subordinatif “karena” membawa hubungan kausal antara frasa nomina “penundaan vaksin” dan “prinsip kehati-hatian presiden”. Dalam hal ini, penundaan vaksinasi oleh pemerintah merupakan wujud kehati-hatian pemerintah demi kebaikan masyarakat sebagai calon penerima vaksin.

KC.5 menyoroti vaksinasi dari aspek kandungannya yang diisukan mengandung substansi yang tidak halal. Konjungsi koordinatif “dan” pada KC.5 menyiratkan bahwa masyarakat calon penerima vaksin tidak perlu khawatir akan kandungan vaksin sebab pemerintah akan memastikan keamanan dan kehalalannya sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Aspek vaksinasi lain yang menjadi sorotan adalah wacana vaksin berbayar. Data KC.6 mengindikasikan ketidaksetujuan *cnnindonesia.com* dengan wacana tersebut. Konjungsi subordinatif “untuk” memuat koherensi tujuan yang menunjukkan pertalian antara konstituen “vaksin gratis” dan “mencapai herd immunity”. Dalam hal ini, *cnnindonesia.com* percaya bahwa untuk mencapai *herd immunity* dan mengakhiri pandemi, vaksinasi harus berbayar agar cakupan distribusinya lebih luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Terkait tidak meratanya penyaluran bansos, *cnnindonesia.com* mencoba menampilkan solusi alternatif yang ditawarkan oleh presiden. Konjungsi subordinatif “jika” membawa koherensi persyaratan yang mengaitkan “warga miskin belum dapat (bansos)” dengan “(penyaluran) bansos fleksibel”. Dalam konteks ini, presiden menyarankan agar penyaluran bansos dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan tanpa harus terikat dengan data yang tumpang-tindih. Perbaikan data akan menyita lebih banyak waktu, sehingga penyaluran bansos yang lebih fleksibel dianggap sebagai solusi jangka pendek yang cukup efektif dan masuk akal.

Pemetaan Media

Penggunaan kosa kata dan konjungsi oleh ketiga media berita digital menunjukkan keragaman sikap terhadap setiap kebijakan pemerintah selama pandemi. Terkait kebijakan penerapan kembali PPKM, *detiknews.com* menunjukkan ketidaksetujuannya dengan

menggunakan kosakata yang membawa konotasi negatif yang menunjukkan kegagalan dan dampak buruk penerapan PPKM sebelumnya serta desakan dari berbagai pihak untuk menerapkan PSBB. Selain itu, detiknews.com juga memanfaatkan konjungsi untuk menunjukkan potensi PPKM ulang sebagai blunder. Sementara itu, kompas.com lebih banyak memanfaatkan frasa adjektiva dengan negasi untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pemberlakuan kembali PPKM yang dianggap tidak efektif dan tidak relevan lagi. Sebaliknya, kompas.com berusaha menonjolkan keuntungan penerapan PSBB yang dipandang mampu mengurangi kasus penularan Covid-19.

Mengenai kebijakan vaksinasi, detiknews.com lebih berfokus pada pematahan isu-isu negatif yang keliru. Isu pertama adalah terkait perbedaan antara vaksin yang akan digunakan oleh presiden dengan yang akan digunakan oleh masyarakat. Isu berikutnya adalah keamanan dan kehalalan kandungan vaksin. Melalui penggunaan kosakata dan konjungsi, detiknews.com berupaya menunjukkan kepastian keamanan dan kehalalan vaksin sebelum didistribusikan ke masyarakat. Dalam konteks yang sama, kompas.com mengulas vaksinasi dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kompas.com mendukung penundaan vaksinasi sebelum dipastikan kehalalan dan keamanannya. Kedua, kompas.com tidak setuju dengan vaksin berbayar karena dianggap berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan finansial pribadi dan menghambat pencapaian *herd immunity*. Sudut pandang yang hampir sama juga digunakan oleh cnnindonesia.com yang memandang pemberlakuan vaksin berbayar justru bertentangan dengan janji presiden untuk memprioritaskan kesehatan rakyatnya dan status bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Isu ketiga adalah berbagai polemik yang menyelimuti penyaluran bansos. Pada beberapa kesempatan, detiknews.com menunjukkan adanya masalah dalam penyaluran bansos yang disebabkan oleh data yang dimanipulasi. Namun, detiknews.com tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab terkait buruknya data tersebut. Media digital kompas.com mengulas persoalan bansos dari sudut pandang potensinya untuk disalahgunakan oleh kepala-kepala daerah untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini, kompas.com menyiratkan bahwa tumpang-tindihnya data penerima bukan kelalaian pemerintah saja, tetapi juga kepala-kepala daerah yang berpotensi memanipulasi data demi kepentingan pribadi. Sementara itu, cnnindonesia.com mengulas persoalan bansos lebih luas. Selain karena penggunaan data lama, kacaunya data penerima bansos juga disebabkan oleh manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, tawaran Presiden Jokowi untuk menyalurkan bansos secara fleksibel sesuai dengan data di lapangan dipandang efektif dan masuk akal.

PENUTUP

Kosakata dan konjungsi dimanfaatkan oleh media-media berita digital secara berbeda sesuai dengan ideologi mereka. Hal ini terutama untuk menunjukkan posisi mereka terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama pandemi.

Detiknews.com tidak setuju dengan penerapan PPKM yang direncanakan oleh pemerintah, mendukung program vaksinasi pemerintah dengan menepis isu-isu keliru tentang vaksin, dan menempati poros tengah dalam kisruh data bansos antara daerah dan pusat. Kompas.com juga berdiri di posisi yang sama dalam isu PPKM dan vaksinasi. Namun terkait kisruh data bansos pusat-daerah, kompas.com lebih cenderung berada di posisi pemerintah. Sementara itu, cnnindonesia.com bahkan tidak mempermasalahkan polemik PPKM-PSBB, menitikberatkan ketidaksetujuannya pada vaksinasi berbayar, dan menempati poros pemerintah dalam kisruh data bansos pusat-daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, K. A., & Basuki. (2018). Media dan NYIA:(Analisis Wacana Kritis Pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta International Airport dalam Pemberitaan Media Lokal di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 69–80. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art5>
- Bao, H., Cao, B., Xiong, Y., & Tang, W. (2020). Digital Media's Role in the COVID-19 Pandemic. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(9), 1–3. <https://doi.org/10.2196/20156>
- Bouvier, G., & Machin, D. (2018). Critical Discourse Analysis and the Challenges and Opportunities of Social Media. *The Review of Communication*, 18(3), 178–192. <https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1479881>
- Budhirianto, S., Noneng, S., & Syaidah. (2018). Analisis Wacana Media Terhadap Kebijakan dan Citra Pemerintah di Surat Kabar Daerah pada Tahun 2017. *Jurnal PIKOM*, 19(2), 101–114. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v19i2.1607>
- Chaer, A. (2009). *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cissel, M. (2012). Media Framing: a Comparative Content Analysis on Mainstream and Alternative News Coverage of Occupy Wall Street. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 3(1), 67–77.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (2001). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fathurokhmah, F. (2018). Ideologi Radikalisme dalam Islam tentang Wacana Homoseksual di Media Massa. *INJECT Interdisciplinary Journal of Communication*, 3(2), 193–212. <https://doi.org/10.18326/inject.v3i2.193-212>
- Finoza, L. (2013). *Komposisi Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa*. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Fowler, R. (1991). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. New York: Routledge.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (1985). *Speaking of the President*. Dalam Michel Gurevitch dan Mark R. Ley (ed.). *Mass Communication Review Yearbook*. Vol 4. Mass Communication Review Yearbook: Vol.4.
- Halwati, U. (2014). Membongkar Konstruksi Politik di Media Massa. *JPA*, 15(2), 235–257. <https://doi.org/10.24090/jpa.v15i2.2014.pp235-257>
- Huda, L. N. (2022). Critical Discourse Analysis of Online Media News: Ministry of Religious Affairs Banning Arabic Language. *Leksema Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(1), 37–47. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v7i1.4911>
- Jamil, A., Daniel, D., & Qassem, A. (2021). News Discourse on the 212 Social Movements: Critical Discourse Analysis on Republika and Media Indonesia. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 203 – 212. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2748>
- Landert, D. (2014). *Personalisation in Mass Media Communication: British Online News between Public and Private (Vol. 240)*. John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/pbns.240>
- Limaye, R. J., Sauer, M., Ali, J., Bernstein, J., Wahl, B., Barnhill, A., & Labrique, A. (2020). Building trust while influencing online COVID-19 Content in the Social Media World. *The Lancet Digital Health*, 2(6), 277–278. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30084-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30084-4)
- Lubis, H. H. (2011). *Analisis Wacana Pragmatic*. Bandung: Angkasa.
- Muslich, M. (2010). *Garis-Garis Besar Tatabahasa Buku Bahasa Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasucha, Y., Rohmadi, M. B., & Wahyudi, A. (2009). *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). *Reuters Institute Digital News Report 2021*. Retrieved from <https://srrn.com/abstract=3873260>
- Nurdin, M. H. (2020). Representasi Ideologi dalam Teks Berita Kriminal Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis. Universitas Negeri Makassar.
- Nurhusna. (2017). Penanda Kualitas Mewujud Adjektiva sebagai Ideologi dalam Wacana Iklan Advertorial Media Massa Cetak. *RETORIKA Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(1),

- 36–42. <https://doi.org/10.36277/basataka.v3i1.81>
- Putra, A., Cangara, H., & Darwis. (2015). Wacana Kritis Berita Online Kasus Penyadapan Pembicaraan Telepon Elit Indonesia oleh Agen Rahasia Australia. *Komunikasi KAREBA*, 4(1), 1–9.
- Rusadi, U. (2015). *Kajian Media: Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori, dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schäfer, M. S. (2011). Sources, Characteristics and Effects of Mass Media Communication on Science: A Review of the Literature, Current Trends and Areas for Future Research. *Sociology Compass*, 5(6), 399–412. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00373.x>
- Sobur, A. (2011). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsul, A., & Romli, M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- van Leeuwen, T. (2008). Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis. In *Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso-/9780195323306.001.0001>
- World Health Organization. (2022). WHO Corona Virus Disease(COVID-19) Dashboard. Retrieved March 28, 2022, from <https://covid19.who.int/>
- Xie, Q. (2018). Critical Discourse Analysis of News Discourse. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(4), 399–403. <https://doi.org/10.17507/tpls.0804.06>
- Yuliantri, R. D. A., & Darmatadara, A. (2015). Political Battle of Mass Media Critical Discourse Analysis: Suara Partai Masjumi Magazine and Bintang Merah Magazine in 1951. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(1), 27–31. <https://doi.org/10.26417/ejis.v2i1.p27-31>